

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Edited by Andi Maulana Mustamin. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Araf, Al, Ardi Manto Adiputra, Annisa Yudha Apriliasari, Evitarossi S. Budiawan, Hussein Ahmad, Gufron Maburri, and Niccolo Attar. (2019). *Evaluasi Praktik: Pidana mati Era Pemerintahan Joko Widodo*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Imparsial.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- . (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Firdaus. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Penerbit Thafa Media. Cetakan 1. Yogyakarta: Thafa Media.
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Barama, Michael. (2015). *Tindak Pidana Khusus*. Unsrat Press. Manado: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sam Ratulangi.
- Budiman, Adhigama Andre, Iftitahsari, and Maidina Rahmawati. (2022). *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2021 “Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!” Institute for Criminal Justice Reform*. Jakarta Selatan.
- Budiman, Adhigama Andre, Genoveva A.K.S Maya, Girlie L.A Ginting, Iftitahsari, Johana G.S.D Poerba, and Maidina Rahmawati. (2022) *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia: Tak Ada Yang Terlindungi*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Chajawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. (2001). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Budiman, Adhigama Andre. (2017). *Pidana Mati Dan Posisi Indonesia Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Dan Resolusi Dewan HAM PBB*. Jakarta:

Institute for Criminal Justice Reform.

- Hutapea, Bungasan. (2016). *Kontroversi Penjatuhan Pidana mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2017) *Pembaharuan Hukum Pidana*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Kusumo, Bambang Ali. (2020) *Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana DiBidang Perpajakan*. Cetakan Pertama. Surakarta: Unisri Press.
- Mahmud, Marzuki Peter. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara,
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Cetakan Pertama. Mataram,
- Napitupulu, Eramus Abraham (2020). *Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu Dan Rekomendasi Komutasi Pidana mati*. Jakarta: Komisi Nasioinal Hak Asasi Manusia dan Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP).
- Rozarie, R.A DE. (2015) *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Jawa Timur: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Cetakan Ulang ke Tiga Belas. Bogor: Politeia,.
- Sriwidodo, Joko, (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek."* Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kepel Pres
- Suratno, Ujang. (2020). *Pendidikan Pancasila*. Januari 2020. Yogyakarta: K-Media,.
- Suyono, Yoyok Ucok, and Dadang Firdiyanto. (2020). *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia,.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Edisi Ke-1. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama,.
- wahyuningsih, Sri Endah. (2010). *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Waluyo, Bambang. (2004). *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Skripsi

- Achmad, Ruben. (2013). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas*, V(2): 79-104.
- Adhayanto, Oksep. (2011). Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Fisip Umrah*, 2(2), 156-174.
- Aditama, Ryan. (2019). Penerapan Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Wajah Hukum*. Vol. 3(2): 184-191.
- Amalia, Mia. (2012). Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 27(2), 554-561.
- Amiruddin. (2011). Mekanisme Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. (Skripsi, Universitas Borneo, Tarakan)
- Anggraeni, Nurafni. (2019). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Imigran (Studi Kasus Di Kota Makassar). (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar)
- Anjarsari, Wulan Puji. (2021). Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3): 485-494.
- Anisa, Darania. (2020). Korelasi Kemiskinan Dan Kejahatan. *Jurnal Penelitian Hukum* 2(2), 250-255.
- Anshari, and M Fajrin. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia). *Res Judicata* 3(1), 26-50.
- Anugrah, Roby, and Raja Desril. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80-95.
- Arief, Moh. Zainol. (2022). Orientasi Pembaharuan Pemidanaan Untuk Pemenuhan Hak Korban Dalam Sistem Penegak Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(2), 191-204.
- Atmasasmita, Romli. (2012). Memahami Teori Hukum Integratif. *Legalitas*, III (2), 1-17.
- Baehaqi, Eki Sirojul. (2022). Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdlyyah Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 1-10.
- Baital, Bachtiar. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*. 1(1): 19-38.
- Cahyaningtyas, Ayu Catur Rizkia Regita. (2023). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia. (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang).
- Damardjati, Supadjar, Ali Mudhofir, Sri Soeprapto, and Noor MS Bakry. (1996). Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila. *Jurnal Filsafat*, Desember, 53-62.
- Dewi, Natasya Sefriana. (2021). Sistem Hukum Pidana Yang Memiliki Manfaat Baik Bagi Masyarakat. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 6(10), 1-11.

- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(1), 104-114.
- Dotulong, Jeaniffer Rachel Gabriella, Olga A. Pangkerego, and Roy V. Karamoy. (2022). Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(3). 1-13.
- Farida, Any, and Nasichin. (2018). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia: Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental. *Hukum Ransendental* 6(3), 227-240.
- Fraja, St. Ika Noerwulan, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, and Ury Ayu Masitoh. (2021). Perbandingan Penerapan Pidana mati Di Indonesia Dan Belanda. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 50-75.
- Handayani, Emy, and Fatih Misbah. (2019). Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif. *Crepido (Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum)*, 1(1), 23-31.
- Handayani, Febri. (2016). Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Pekanbaru. *Hukum Islam*, XVI(1), 47-70.
- Handoyo D.P., Spto.(2018). Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Palar Pakuan Law Review*, 4(1), 24-48.
- Hasuri, Hasuri, and Mia Mukaromah. (2020). Analisis Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 193-202.
- Heltaji, Herlina. (2021). Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia. *Pamulang Law Review*, 4(2), 157-168.
- Isjwara, Faiz Fakhri. (2020). Dampak Overcapacity Terhadap Tingkat Status Gizi Narapidana. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dentist)*, 15(1), 60-66.
- Izad, Rohmatul. (2019). Pidana Pidana mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1), 1-16.
- Jacob, Efryan R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964. *Lex Crimen*, VI(1), 98-105.
- Juita, Subaidah Ratna, Amri Panahatan Sihotang, and Supriyadi Supriyadi. (2020). Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(5), 271-285.
- Jushak, Muhammad Ifraj. (2022). Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Palopo)
- Kania, Dede. (2015). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Yustisia*, 4(1). 55-72
- Krismiarti, Krismiayanti. (2016). Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal. *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(1), 44-70.
- Kumalasari, Rosa. (2020). Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. *Literasi Hukum*, 21(1), 1-14.

- Kusumo, Ayub Torry Satriyo. (2015). Pidana mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional. *Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM*, 1-14.
- Leonard, Tommy. (2017). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. (Skripsi, Universitas Prima Indonesia)
- Ludiana, Tia. (2020). Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP). *Jurnal Litigasi*, 21(1), 60-79.
- Manihuruk, Tri Novita Sari, Yusuf Daeng, and Olivia Anggie Johar. (2022). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 162-169.
- Maramis, Adrian. (2019). Pemberian Grasi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, VII(7), 61-68.
- Ohoiwutun, Y. A. Triana. (2022). Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 63-82.
- Pangestu, Bayu Adjie. (2020). Pencapaian Tujuan Pemidanaan Berlandaskan Teori Integratif Pada Tindak Pidana KDRT. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(4), 795-801.
- Pradityo, Randy. (2017). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(02), 133-144.
- Pratiwi, Pratiwi. (2022). Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 7098-7112.
- Putra, Aista Wisnu, and Rahmi Dwi Sutanti. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 319-330.
- Putra, Robby Septiawan Permana, R B Sularto, and Untung Sri Hardjanto. (2016). Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18.
- Ramdan, Ajie, Rully Herdita Ramadhani, and Mei Susanto. (2018). Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan HAM. *Arena Hukum*, 11(3), 600-617.
- Rante, Devi Y, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. (2022). Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(9), 1496-1505.
- Rohman, Arif. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 26-39.
- Rosadi, Otong, Ferdi Ferdi, and Rahmat Hidayat. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 6(3), 346-355.

- Safitri, Myrna A., Ricca Anggraeni, Adnan Hamid, and Kunthi Tridewiyanti. (2021). Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengaturan Tentang Pemasyarakatan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(02), 247-265.
- Solama, Wita, and Pini Alvionita. (2021). Cara Menyusui Yang Benar Pada Bayi Berdasarkan Pengetahuan Dan Sikap Ibu. *Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan*. 13(1), 72-85.
- Saputra, Adi, and Febrian Jadug Santoso. (2016). Death Penalty and the Right To Life in Human Rights. *Unnes Law Journal*, 5(1), 1-8.
- Sari, Gadis Fransiska Apriliana, Ibrahim Asyam Qurrataa'yun, and Ihsanudin Herry Setyawan. (2023). Keadilan Terhadap Keputusan Hukum Sesat Berhubungan Pada Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4222-4231.
- Soge, Paulinus. (2012). Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), 94-104.
- Sutoyo, Daniel. (2019). Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Pidana mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Dumanis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 171-198.
- Syatar, Abdul. (2018). Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 16(1), 118-134.
- Usanto, Mei, and Ajie Ramdan. (2017). Kebijakan Moderasi Pidana Mati 'Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.' *Jurnal Yudisial*, 10(2), 193-215.
- Usman. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 62-78.
- Wardana, I Wayan. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 265-284.
- Yuningsih, Henny, and Vera Novianty. (2015). Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika. *Seminar Nasional Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum*, 1(1), 43-53.
- Yunus, Nur Rohim, Siti Romlah, Siti Nurhalimah, and Latipah Nasution. (2022). Overview Of Indonesia Law And Internasional Law On Terrorism As An Extraordinary Crime. *Jurnal Hukum Replik*, 10(1), 111-131.
- Zulva, Eva Achjani. (2007). Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia). *Lex Journalica (Ilmu Hukum)*, 4(2), 93-100.
- Zuraidah, Mimin. (2021). Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945)

Peraturan Perundang-Undangan

- Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta, 2015.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Tambahan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208

Internet

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." Accessed March 30, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Darmawan, Iwan. "Pro Dan Kontra Pidana Mati." Last modified 2015. Accessed June 17, 2023. https://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf.

Indah, Pratiwi Putri. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Nomor: 1149/Pid.Sus/2016/Pn.Jkt.Brt)." *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM."* Last modified 2020. Accessed April 2, 2023. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/327/>.

